KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI SEBAGAI LEMBAGA ADAT DALAM HAL TERJADI SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI SUMATERA BARAT

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada

Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Oleh

AHMAD MAULIA PAUL
NIM. 1820112043

Dosen Pembimbing
1. Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum
2. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021

KEDUDUKAN KERAPATAN ADAT NAGARI SEBAGAI LEMBAGA ADAT DALAM HAL TERJADI SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI SUMATERA BARAT

(Ahmad Maulia Paul, 1820112043, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 166 Halaman)

ABSTRAK

Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat musyawarah tertinggi dapat menyelesaikan permasalahan sako dan pusako sehingga dalam penyelesaiannya Kerapatan Adat Nagari dapat menjadi hakim atau mediator serta dapat mengeluarkan sebuah surat keputusan atas sengketa yang diajukan kepadanya dengan cara damai.Oleh karena itu ada 2 (dua) buah kasus penerbitan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari Guguak VIII Koto dan Kerapatan Adat Nagari Sungai Patai mengenai sako yang kemudian surat keputusan diajukan oleh pihak yang dirugikan ke Peradilan Tata Usaha Negara terhadap kasus yang sama dengan hasil putusan yang berbeda. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas,dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu :1).Bagaimana kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam pengangkatan penghulu 2). Bagaimana kedudukkan Kerapatan Adat Nagari dalam sengketa Tata Usaha Negara dan 3).Bagaimana pertimbangan hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili surat keputusan Kerapatan Adat Nagari. Dalam penelitian penulis melakukan pendekatan yuridis normative sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendekatan pendukung dan bersifat deskriptif analitis.Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa : 1) Kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam pengangkatan penghulu adalah sebagai Panitia Pengangkatan Penghulu untuk pengesahan/legalisasi terhadap gelar/sako penghulu yang diangkat dari kaum agar gelar/sako penghulu diakui oleh Nagari 2) Kedudukkan Kerapatan Adat Nagari yang terbentuk didalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 13 tahun 1983 merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan dewasa ini Kerapatan Adat Nagari bukanlah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. 3) Pertimbangan Hakim Peradilan Tata Usaha dalam memeriksa & mengadili surat keputusan Kerapatan Adat Nagari dalam perkara No. 327 K/TUN/1996 pertimbangan mengabulkan gugatan Penggugat karena Kerapatan Adat Nagari digolongkan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Surat Keputusan setelah dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari sedangkan dalam Perkara No. 3/G/2017/PTUN.PDG dalam pertimbangan Gugatan tidak diterima dengan berpandangan pada proses sebelum Surat Keputusan dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari tanpa lebih lanjutme mpertimbangkan kedudukan Kerapatan Adat Nagari sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.

Kata kunci : Kedudukan, Kerapatan Adat Nagari, Sumatera Barat, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

THE POSITION OF NAGARI'S CUSTOM DENSITY AS A TRADITIONAL INSTITUTION IN THE EVENT OF STATE ADMINISTRATIVE DISPUTES IN WEST SUMATERA

(Ahmad Maulia Paul, 1820112043, Postgraduate Program Faculty of Law, Andalas University, 2020, 166 Pages)

ABSTRACT

Nagari's Custom Density as customary institution highest deliberation can solve the problem of *sako* and *pusako* so that in its resolution Nagari's Custom Density can become a judge or mediator and can issue a decision letter for the dispute submitted to him in a peaceful manner. Therefore there are 2 (two) cases issuance of a Decree issued by Nagari's Custom Density Guguak VIII Koto and Nagari's Custom Density Sungai Patai regarding *sako* which is then submitted by the aggrieved party to a State Administrative Court against the same case with a different decision. Based on the background of the problems described above, the problems studied can be formulated, namely: 1) What is the authority of the Nagari's Custom Density in the appointment of the headman 2) How to place the Nagari's Custom Density in a State Administration dispute and 3) What is the consideration of the State Administrative Court judges in examining and adjudicating the Nagari's Custom Density decisions. In this research, the author uses a normative juridical approach as the main approach and juridical empirical approach as a supporting approach and is descriptive analytical. From the results of this study it is known that: 1) The authority of the Nagari's Custom Density in appointing the headman is as the Committee for Appointment of the headman to validate / legalize the title / *sako* of the chief who is appointed from the clan so that the title / *sako* of the head is recognized by the Nagari's 2) The position of Nagari's Customary Density formed in West Sumatra Regional Regulation No. 13 of 1983 is a State Administrative Agency / Office while today the Nagari's Customs Density is not a State Administrative Agency / Office. 3) Consideration of Administrative Court Judges in examining & adjudicating the Nagari's Customary Density decision letter in case No. 327 K / TUN / 1996 considerations to grant the Plaintiff's claim because Nagari Customary Density is classified as a State Administration Agency / Officer and the Panel of Judges considers the Decree after being issued by Nagari Customary Density while in Case No. 3 / G / 2017 / PTUN.PDG in the consideration of the Lawsuit is not accepted by considering the process before the Decree is issued by Nagari's Customary Density without further considering the position of Kerapatan Adat Nagari as State Administrative Agency / Officer.

Keywords: Position, Nagari's Customary Density, West Sumatra, and State Administrative Court.